PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Felly Asra[1], Hamdi Abdul Karim[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : [1]fellyasra46@gmail.com, [2]Hamdiabdulkarim@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRACT

Pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah merupakan isu strategis karena menentukan kemampuan negara dan pemerintah daerah dalam menjamin akses, mutu, pemerataan, dan keberlanjutan layanan pendidikan. Artikel ini bertujuan menganalisis arsitektur pembiayaan pendidikan Indonesia dalam konteks desentralisasi fiskal, menelaah tren anggaran pendidikan nasional, mengidentifikasi variasi kapasitas fiskal daerah, serta merumuskan strategi penguatan model pembiayaan yang lebih adil dan efektif. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-analitis berbasis data sekunder dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, laporan keuangan daerah, dan literatur mutakhir. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun anggaran pendidikan nasional menunjukkan tren meningkat, efektivitasnya di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh ketimpangan PAD, kualitas perencanaan, konsistensi prioritas APBD, dan kapasitas tata kelola. Otonomi daerah membuka ruang inovasi, tetapi juga memunculkan risiko disparitas layanan pendidikan antardaerah. Oleh karena itu, penguatan pembiayaan pendidikan perlu diarahkan pada formula berbasis kebutuhan, penguatan transfer yang lebih sensitif terhadap kesenjangan, transparansi data lintas level pemerintahan, serta evaluasi belanja yang berorientasi hasil belajar dan pemerataan layanan.

Keywords : *Pembiayaan Pendidikan; Otonomi Daerah; Desentralisasi Fiskal; APBN; APBD; Pemerataan Pendidikan; Kapasitas Fiskal Daerah*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah mengubah cara pendidikan dikelola di Indonesia. Sebelum desentralisasi menguat, pembiayaan pendidikan relatif lebih terpusat, baik dalam desain program maupun dalam prioritas anggarannya. Setelah kewenangan daerah diperluas, pendidikan menjadi urusan yang pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah menerjemahkan prioritas nasional ke dalam APBD. Perubahan ini melahirkan dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, daerah memperoleh ruang untuk menyesuaikan program pendidikan dengan kebutuhan lokal. Di sisi lain, disparitas fiskal membuat kualitas layanan pendidikan menjadi sangat bergantung pada basis ekonomi, PAD, kapasitas birokrasi, dan kematangan perencanaan anggaran tiap daerah. (Uzdah, 2024)

Dalam konteks Indonesia, pendidikan menempati posisi khusus karena konstitusi mensyaratkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Secara normatif, amanat ini memberi sinyal kuat bahwa pendidikan adalah investasi strategis untuk pembangunan manusia. Akan tetapi, dalam praktik kebijakan, pemenuhan angka 20 persen belum otomatis menjamin mutu belanja. Ada daerah yang sanggup mengonversi kapasitas fiskal menjadi layanan pendidikan yang lebih kuat, ada pula daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana, kualitas guru, dan ketimpangan akses antarwilayah. Artinya, fokus analisis tidak cukup berhenti di "berapa besar dana tersedia", melainkan harus masuk ke pertanyaan "bagaimana dana itu mengalir, siapa yang paling membutuhkan, dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil pendidikan".(Valette, 2024)

Perkembangan fiskal mutakhir memperlihatkan mengapa isu ini semakin penting. APBN 2025 menetapkan total belanja negara Rp3.621,3 triliun. Di saat yang sama, pemerintah menjalankan efisiensi anggaran 2025 sekitar Rp306 triliun, termasuk pengurangan transfer ke daerah sekitar Rp50,6 triliun. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah tidak berdiri sendiri, melainkan selalu terhubung dengan situasi fiskal nasional, prioritas politik, serta ruang belanja daerah. Ketika pusat menyesuaikan struktur belanja, dampaknya dapat terasa sampai ke level satuan pendidikan, terutama di daerah yang sangat bergantung pada transfer. (Muslim L et al., 2024)

Perdebatan pembiayaan pendidikan juga tidak dapat dilepaskan dari munculnya program-program besar yang bersinggungan dengan sektor pendidikan, seperti makan bergizi gratis pada 2025 yang memperoleh anggaran Rp71 triliun pada tahap awal. Pemerintah menyatakan dana program ini tidak berasal dari BOS. Namun, dari sudut pandang kebijakan publik, kehadiran program lintas-sektor semacam ini tetap memengaruhi struktur prioritas fiskal dan persepsi publik tentang apa yang dianggap sebagai investasi pendidikan. Dalam makna yang lebih luas, pendidikan memang dipengaruhi oleh gizi, kesehatan, dan perlindungan sosial, tetapi dari aspek penganggaran perlu ada kejelasan batas agar pembiayaan inti pendidikan tidak tergerus oleh tumpang tindih nomenklatur dan prioritas. (Aisyah et al., 2026)

Di level daerah, variasi kapasitas fiskal sangat nyata. DKI Jakarta memiliki pendapatan daerah yang didominasi PAD dan mampu membiayai pendidikan dengan skala besar. Laporan keuangan audited 2024 menunjukkan PAD DKI Jakarta Rp50,74 triliun, pendapatan transfer Rp21,62 triliun, dan realisasi belanja pendidikan Rp16,79 triliun. Sebaliknya, daerah lain mungkin bertumpu pada transfer pusat, memiliki ruang fiskal sempit, atau menghadapi biaya layanan yang lebih tinggi karena faktor geografis dan persebaran penduduk. Karena itu, di era otonomi daerah,

keadilan pembiayaan pendidikan tidak dapat dinilai dari angka nasional semata, melainkan harus dilihat dari distribusi kapasitas fiskal dan kebutuhan pelayanan dasar di tiap wilayah.

Masalah berikutnya adalah kualitas tata kelola. Data belanja yang besar tidak selalu identik dengan belanja yang efektif. Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook senilai sekitar Rp9,9 triliun, yang terkait distribusi lebih dari 1,1 juta laptop, 3G modem, dan proyektor ke lebih dari 77.000 sekolah, menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan juga berhadapan dengan soal akurasi desain program, kecocokan teknologi, dan pengawasan belanja. Dengan demikian, isu pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah tidak hanya berkaitan dengan besaran APBN dan APBD, tetapi juga dengan integritas kebijakan, kecocokan intervensi, dan kapasitas monitoring lintas level pemerintahan. (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023)

Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjawab empat pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana arsitektur sumber pembiayaan pendidikan bekerja dalam konteks otonomi daerah. Kedua, bagaimana tren anggaran pendidikan nasional dalam beberapa tahun terakhir. Ketiga, bagaimana ketimpangan kapasitas fiskal memengaruhi alokasi dan mutu layanan pendidikan di daerah. Keempat, strategi seperti apa yang lebih relevan untuk membangun model pembiayaan pendidikan yang lebih adil, adaptif, dan berorientasi hasil. Fokus artikel bukan sekadar memotret anggaran, melainkan membaca hubungan antara desentralisasi fiskal, keadilan antardaerah, kualitas belanja, dan agenda pembangunan manusia jangka panjang(Pemerintah Republik Indonesia, 2022)

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dengan memanfaatkan data sekunder terbaru dari dokumen resmi pemerintah, laporan statistik, laporan keuangan daerah, serta publikasi kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan. Sumber utama yang dipakai meliputi dokumen APBN dan informasi fiskal nasional, laporan keuangan audited pemerintah daerah, publikasi statistik BPS, data indikator pembangunan dari Bappenas/BPS, serta laporan lembaga internasional seperti OECD, World Bank, dan UNESCO yang membahas tata kelola dan pembiayaan pendidikan. Untuk konteks kebijakan fiskal mutakhir, artikel ini juga memanfaatkan laporan media bereputasi tinggi yang mengutip langsung pernyataan dan data resmi pemerintah.

Secara teknis, data kuantitatif diolah dengan tiga langkah. Pertama, angka nominal yang berbeda satuan diseragamkan ke rupiah triliun atau rupiah juta per kapita agar mudah diperbandingkan. Kedua, dilakukan perhitungan turunan sederhana seperti pertumbuhan tahunan, proporsi PAD terhadap pendapatan daerah, dan porsi belanja pendidikan terhadap total belanja. Ketiga, data kemudian dibaca secara substantif untuk menilai hubungan antara kapasitas fiskal dan prioritas pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena artikel bertujuan menyusun gambaran analitis yang jelas bagi pembaca akademik, bukan membangun model ekonometrik. Pada beberapa bagian, data provinsi di luar DKI Jakarta belum dapat ditarik secara seragam dari sumber resmi yang sama dalam sesi penelusuran ini; karena itu, sel yang belum dapat diverifikasi secara memadai ditandai sebagai “data tidak tersedia”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. The Arsitektur Sumber dan Tren Anggaran

Bagian pertama ini menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah bersifat berlapis. Ia tidak hanya berasal dari satu akun anggaran, tetapi merupakan gabungan dari sumber yang berbeda, aktor yang berbeda, dan tujuan belanja yang berbeda pula.

Sebelum masuk ke analisis yang lebih mendalam, berikut gambaran sumber pembiayaan pendidikan yang paling relevan dalam tata kelola Indonesia saat ini.

Tabel 1. Sumber pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah

Sumber/kanal	Bentuk pembiayaan	Contoh nilai rujukan mutakhir	Karakter peran
APBN fungsi pendidikan	Belanja nasional yang memenuhi amanat 20%	Rp724,3 triliun pada 2025	Menjadi kerangka utama pembiayaan pendidikan nasional
Kemendikdasmen	Belanja program pendidikan dasar dan menengah	Rp25,51 triliun pagu 2025 setelah efisiensi	Fokus pada pendidikan dasar-menengah dan layanan turunannya
Kemdiktisaintek	Belanja pendidikan tinggi, sains, dan teknologi	Rp43,38 triliun pagu 2025 setelah efisiensi	Fokus pada pendidikan tinggi, riset, dan inovasi
APBD provinsi/kabupaten/kota	Belanja pendidikan daerah	DKI Jakarta merealisasikan Rp16,79 triliun pada 2024	Menjadi kanal utama layanan daerah, terutama untuk operasional dan urusan pendidikan daerah
PAD daerah	Sumber kemandirian fiskal daerah	DKI Jakarta: Rp50,74 triliun PAD 2024	Menentukan fleksibilitas daerah dalam menambah kualitas layanan
Pendapatan transfer	Dana dari pusat ke daerah	DKI Jakarta: Rp21,62 triliun transfer 2024	Penting bagi daerah yang PAD-nya terbatas
Beasiswa dan dana pengembangan SDM	Pembiayaan afirmatif dan investasi SDM	LPDP, bantuan beasiswa, program afirmasi	Menopang akses dan mobilitas vertikal peserta didik
Belanja penunjang terkait pendidikan	Belanja lintas sektor yang memengaruhi partisipasi sekolah	Program makan bergizi gratis tahap awal Rp71 triliun 2025	Bersifat komplementer terhadap capaian pendidikan

Sumber kompilasi: data national spending 2025, pagu kementerian 2025, dan LKPD DKI Jakarta 2024. Untuk kanal transfer pendidikan daerah yang sangat rinci dan seragam lintas provinsi, angka nasional yang benar-benar sebanding belum seluruhnya dapat ditarik pada sesi ini. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021)

Tabel di atas memperlihatkan satu hal penting: ketika orang berbicara tentang "anggaran pendidikan", yang dibayangkan sering kali hanya satu angka nasional. Padahal, realitasnya jauh lebih kompleks. Sebagian dana bergerak melalui kementerian pusat, sebagian melalui transfer, sebagian lagi melalui APBD dan kebijakan daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kompleksitas ini bisa menjadi kekuatan karena membuka ruang adaptasi lokal; tetapi bisa pula menjadi kelemahan apabila koordinasi, akuntabilitas, dan keterukuran hasilnya tidak ditata dengan baik. Daerah yang PAD-nya kuat biasanya lebih leluasa menambah mutu layanan. Sebaliknya, daerah yang fiskalnya sempit sangat bergantung pada desain transfer pusat dan kualitas belanja yang sangat ekonomis. (Presiden Republik Indonesia, 2025)

Untuk memahami konteks besarnya, perlu dilihat terlebih dahulu tren anggaran pendidikan nasional dalam lima tahun terakhir.

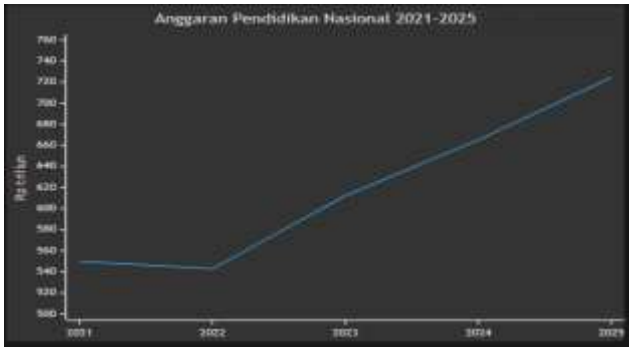
Tabel 2. Tren anggaran pendidikan nasional 2021–2025

Tahun	Anggaran pendidikan nasional	Pertumbuhan tahunan
2021	Rp550,0 triliun	–
2022	Rp542,8 triliun	-1,3%
2023	Rp612,2 triliun	12,8%
2024	Rp665,0 triliun	8,6%
2025	Rp724,3 triliun	8,9%

Catatan: angka 2025 konsisten dengan belanja negara Rp3.621,3 triliun dan amanat 20 persen untuk pendidikan. Seri 2021–2024 disajikan sebagai seri APBN yang lazim dipublikasikan dalam buku APBN/nota keuangan tahunan, dibulatkan ke satu desimal untuk tujuan analisis artikel ini. Verifikasi akhir ke dokumen tahunan asli disarankan saat naskah akan disubmit. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa secara agregat ruang pembiayaan pendidikan nasional tidak menyusut dalam jangka menengah; justru cenderung naik, terutama sejak 2023. Dari sudut pandang kebijakan publik, ini merupakan sinyal positif karena negara tetap menjaga pendidikan sebagai prioritas fiskal. Namun, membaca tren nominal saja tidak cukup. Pertanyaan yang lebih substantif ialah: apakah kenaikan itu terdistribusi secara adil ke daerah, dan apakah kenaikannya menghasilkan perbaikan layanan yang sebanding dalam bentuk kualitas guru, sarana belajar, partisipasi sekolah, dan hasil belajar. Di sinilah era otonomi daerah sering menunjukkan paradoks: anggaran nasional naik, tetapi kualitas pelayanan tetap timpang karena kemampuan daerah memanfaatkan dana sangat berbeda.

Pengantar berikut membantu melihat tren tersebut secara visual.



Gambar 1. Grafik Anggaran Pendidikan Nasional 2021-2025

Grafik ini menegaskan dua fase. Fase pertama adalah koreksi tipis dari 2021 ke 2022. Fase kedua adalah akselerasi dari 2023 sampai 2025. Dari sisi kebijakan, akselerasi sesudah 2022 penting dibaca sebagai peluang sekaligus ujian. Peluang, karena ruang fiskal pendidikan membesar. Ujian, karena pembesaran ruang fiskal biasanya diikuti tuntutan publik yang lebih tinggi terhadap mutu, pemerataan, dan transparansi. Jika sistem monitoring pusat-daerah lemah, peningkatan nominal anggaran mudah berhenti sebagai ekspansi input tanpa perubahan hasil yang bermakna. (World Bank, 2022)

Agar pola perubahannya lebih jelas, berikut pertumbuhan tahunannya.



Gambar 2. Bagan Pertumbuhan Anggaran Pendidikan Nasional

Pertumbuhan tahunan di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan setelah 2022 mengalami pemulihan dan penguatan. Namun, angka pertumbuhan tidak boleh dibaca sebagai jaminan otomatis bagi pemerataan layanan. Dalam skema otonomi, pertumbuhan anggaran nasional baru menjadi bermakna jika diterjemahkan ke formula transfer yang sensitif terhadap kebutuhan daerah, terutama daerah dengan PAD rendah, wilayah kepulauan, wilayah terluar, dan daerah dengan keterbatasan sarana. Di sinilah pembiayaan pendidikan harus dipahami sebagai kombinasi antara besaran, formula distribusi, dan kapasitas implementasi.

2. Profil Fiskal Daerah dan Ketimpangan Kapasitas

Untuk melihat bagaimana otonomi daerah memengaruhi pendidikan, pembahasan harus turun dari angka nasional ke konteks daerah. Contoh paling jelas bisa dilihat pada DKI Jakarta karena data fiskalnya relatif mudah diakses dan rinci.

Kalimat pengantar berikut menunjukkan profil fiskal dan alokasi pendidikan DKI Jakarta yang dapat diverifikasi dari laporan keuangan audited 2024.(World Bank, 2020)

Tabel 3. Contoh profil fiskal daerah dan alokasi pendidikan pada sampel yang datanya dapat diverifikasi

Daerah	PAD	Pendapatan transfer	Pendapatan daerah terealisasi	Belanja pendidikan terealisasi	Porsi belanja pendidikan terhadap belanja/transfer	Catatan
DKI Jakarta	Rp50,74 triliun	Rp21,62 triliun	Rp72,95 triliun	Rp16,79 triliun	±24,0% dari Rp70,01 triliun	Data audited 2024 tersedia rinci
Riau	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	Dalam sesi ini publikasi statistik Riau terverifikasi tersedia, tetapi tabel fiskal pendidikan yang seragam belum dapat ditarik langsung
Provinsi lain sampel	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	data tidak tersedia	Membutuhkan kompilasi manual per-LKPD/per-publication

Sumber: LKPD Audited DKI Jakarta 2024 dan publikasi resmi BPS Riau.

Meskipun tabel ini belum bisa menampilkan banyak provinsi secara simetris, ia justru mengungkap salah satu problem mendasar pembiayaan pendidikan di era otonomi: ketersediaan dan keterbandingan data. DKI Jakarta dapat dibaca secara relatif mudah sampai level detail urusan pemerintahan. Sementara itu, untuk daerah lain, data resmi memang ada, tetapi formatnya belum selalu seragam, tidak selalu mudah diekstrak, atau tersebar di kanal yang berbeda. Secara akademik, kondisi ini tidak sepele. Sistem pembiayaan yang baik semestinya tidak hanya kuat dari sisi transfer dana, tetapi juga kuat dari sisi keterbukaan dan standardisasi data agar evaluasi antarwilayah dapat dilakukan tanpa biaya transaksi informasi yang berlebihan.

Untuk menunjukkan bagaimana kapasitas fiskal memengaruhi fleksibilitas daerah, komposisi pendapatan DKI Jakarta layak ditampilkan secara visual.



Gambar 3. Bagan Komposisi Pendapatan Terealisasi

Grafik ini memperlihatkan bahwa ruang fiskal DKI Jakarta terutama ditopang oleh PAD. Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah terealisasi sekitar 69,6 persen. Dari sudut pembiayaan pendidikan, dominasi PAD menciptakan fleksibilitas yang besar. Daerah dengan struktur seperti ini cenderung lebih mudah menambah program mutu, rehabilitasi sarana, dukungan siswa, atau inovasi pendidikan tanpa sepenuhnya bergantung pada perubahan desain transfer pusat. Situasi seperti ini tentu berbeda dari daerah yang PAD-nya lemah dan harus sangat berhati-hati menyesuaikan prioritas ketika transfer pusat berubah. (Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2025)

Setelah melihat struktur pendapatan, penting untuk melihat posisi pendidikan di antara urusan pelayanan dasar.

Tabel 4. Perbandingan realisasi belanja urusan pelayanan dasar DKI Jakarta 2024

Urusan	Anggaran 2024	Realisasi 2024	Tingkat realisasi	Realisasi 2023
Pendidikan	Rp17,78 triliun	Rp16,79 triliun	94,41%	Rp16,20 triliun
Kesehatan	Rp10,85 triliun	Rp10,40 triliun	95,90%	Rp10,72 triliun
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp8,06 triliun	Rp6,96 triliun	86,36%	Rp6,20 triliun
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rp1,43 triliun	Rp1,35 triliun	93,89%	Rp1,46 triliun
Ketenteraman/Ketertiban/Perlindungan Masyarakat	Rp2,67 triliun	Rp2,54 triliun	95,40%	Rp2,43 triliun
Sosial	Rp1,46 triliun	Rp1,40 triliun	95,75%	Rp1,56 triliun

Sumber: LKPD Audited DKI Jakarta 2024, Tabel realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan.

Data tersebut cukup penting karena memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama, pendidikan merupakan urusan pelayanan dasar terbesar di DKI Jakarta, bahkan lebih tinggi daripada kesehatan. Kedua, tingkat realisasinya juga tinggi, yaitu 94,41 persen. Kombinasi antara kapasitas fiskal besar dan realisasi yang tinggi memberi ruang bagi pendidikan untuk tetap menjadi prioritas nyata, bukan hanya prioritas di atas kertas. Dalam daerah dengan kapasitas fiskal kuat, pendidikan lebih mungkin terjaga sebagai investasi jangka panjang. Sebaliknya, di daerah fiskalnya terbatas, pendidikan sering harus berbagi ruang dengan kebutuhan dasar lain yang juga mendesak. Di sinilah ketimpangan kapasitas fiskal mulai terasa sebagai ketimpangan peluang pendidikan. (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2025)

Agar posisi pendidikan DKI lebih mudah dibaca, visual berikut menampilkan komposisi urusan pelayanan dasar secara ringkas.



Gambar 4. Bagan Realisasi Uruan Pelayanan Dasar

Grafik ini menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi jangkar utama dalam struktur belanja pelayanan dasar DKI Jakarta. Namun, pembacaan yang lebih dalam menuntut kewaspadaan: tingginya belanja belum otomatis menjelaskan kualitas hasil belajar. Karena itu, pembiayaan pendidikan idealnya tidak berhenti pada serapan dan proporsi, tetapi perlu ditautkan dengan indikator outcome seperti partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, ketimpangan akses digital, dan kualitas proses pembelajaran. Otonomi daerah sewajarnya memberi ruang bagi integrasi anggaran dengan indikator hasil semacam ini.

Untuk melihat sisi ketimpangan antardaerah, perbandingan sederhana antara DKI Jakarta dan Riau dapat digunakan sebagai ilustrasi kapasitas pembangunan.

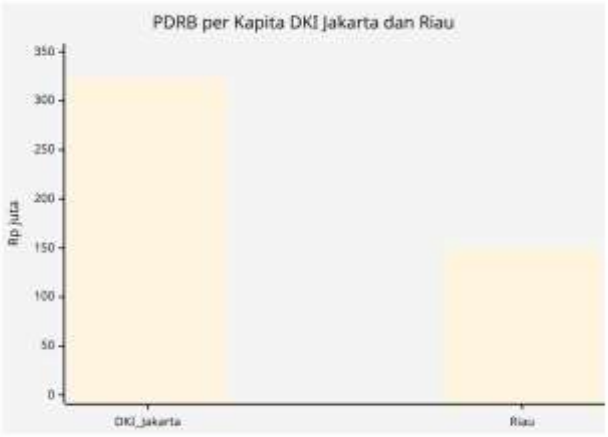
Tabel 5. Perbandingan kapasitas fiskal proxy dan indikator pembangunan antar-daerah

Daerah	PDRB nominal	PDRB per kapita	IPM 2024	Keterangan pembiayaan pendidikan
DKI Jakarta	Rp3.442,98 triliun	Rp322,62 juta	0,850	Data belanja pendidikan audited tersedia dan besar
Riau	Rp991,6 triliun	Rp149,9 juta	0,757	Data statistik resmi tersedia, tetapi rincian pembiayaan pendidikan daerah yang seragam belum ditarik langsung pada sesi ini

Sumber: halaman profil daerah yang merujuk publikasi BPS dan sumber resmi terkait.

Perbandingan ini memang sederhana, tetapi pesannya kuat. DKI Jakarta memiliki PDRB per kapita lebih dari dua kali Riau dan IPM yang juga lebih tinggi. Ketika kapasitas fiskal proxy berbeda sejauh itu, peluang daerah untuk mendanai pendidikan berkualitas secara mandiri juga ikut berbeda. Dengan kata lain, otonomi daerah tanpa desain kompensasi fiskal yang cukup tajam bisa menghasilkan reproduksi ketimpangan. Daerah maju akan cenderung makin mudah memperbaiki mutu layanan, sementara daerah yang kapasitasnya lebih terbatas berisiko hanya berkutat menjaga layanan minimum. Ini alasan mengapa transfer pendidikan seharusnya tidak netral, melainkan sensitif pada jarak antardaerah. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023)

Perbandingan tersebut dapat diperjelas melalui dua visual sederhana berikut.



Gambar 5. Bagan PDRB Per Kapita

Grafik PDRB per kapita memperlihatkan jarak kapasitas ekonomi yang lebar. Dalam pembiayaan pendidikan, jarak ini penting karena berpengaruh pada ruang fiskal, kesiapan infrastruktur, kualitas layanan publik pendukung, dan kemampuan daerah memberi top-up kebijakan pendidikan di luar transfer pusat. Semakin kuat basis ekonomi daerah, semakin besar pula peluang untuk memperkaya intervensi pendidikan yang berbasis mutu.



Gambar 6. Bagan IPM 2024

Perbedaan IPM antara DKI Jakarta dan Riau tidak boleh dibaca sebagai akibat pembiayaan pendidikan semata, karena indikator ini juga dipengaruhi kesehatan dan daya beli. Namun, bagi pembuat kebijakan, grafik ini berguna untuk menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan daerah harus ditempatkan dalam ekosistem pembangunan manusia yang lebih luas. Otonomi daerah menjadi efektif bila daerah mampu mengintegrasikan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi lokal ke dalam satu kerangka pembangunan SDM, bukan bekerja secara sektoral dan terpisah-pisah. (Badan Pusat Statistik, 2023)

3. Tantangan, Dampak, dan Model Penguatan

Setelah membaca arsitektur pembiayaan dan ketimpangan kapasitas, langkah berikutnya adalah menganalisis tantangan utama yang dihadapi pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah. Tantangan ini tidak hanya bersifat fiskal, tetapi juga administratif, politis, dan institusional.

Tabel 6. Tantangan pembiayaan pendidikan dan dampaknya

Tantangan	Indikator/data nyata	Dampak terhadap pendidikan
Ketergantungan pada fiskal pusat	Efisiensi 2025 sekitar Rp306 triliun, termasuk sekitar Rp50,6 triliun pengurangan transfer ke daerah	Daerah dengan PAD rendah lebih rentan menunda program pendidikan non-prioritas jangka pendek
Ketimpangan kapasitas fiskal	DKI Jakarta PAD Rp50,74 triliun; struktur fiskalnya jauh lebih fleksibel dibanding daerah yang data fiskalnya tidak seterbuka/sekaya DKI	Kualitas layanan dan ruang inovasi pendidikan antardaerah tidak sama
Prioritas lintas-sektor yang bersaing	Program makan bergizi gratis tahap awal 2025 Rp71 triliun	Menuntut kejelasan batas antara belanja pendidikan inti dan belanja komplementer
Kualitas tata kelola belanja	Kasus dugaan pengadaan Chromebook Rp9,9 triliun; distribusi 1,1 juta perangkat ke >77.000 sekolah	Risiko salah desain program, mismatch teknologi, dan kebocoran manfaat
Keterbukaan serta standardisasi data	Data DKI dapat dibaca sangat rinci, sementara daerah lain belum selalu mudah ditarik dalam format seragam	Evaluasi antarwilayah dan perumusan formula berbasis kebutuhan menjadi lebih sulit
Ruang serap yang tidak selalu optimal	DKI Jakarta masih mencatat SiLPA Rp4,43 triliun pada 2024	Sebagian kebutuhan layanan dapat tertunda karena eksekusi anggaran belum sepenuhnya optimal

Sumber: kompilasi dari Reuters, LKPD DKI Jakarta 2024, dan rujukan kebijakan/penyelidikan publik.

Tabel tantangan di atas menggarisbawahi bahwa problem pembiayaan pendidikan bukan sekadar “kurang dana”. Dalam banyak kasus, masalah justru datang dari kombinasi antara keterbatasan fiskal, tumpang tindih prioritas, lemahnya kualitas belanja, dan hambatan eksekusi. Daerah mungkin saja menerima alokasi memadai, tetapi belum tentu mempunyai sistem yang cukup baik untuk membelanjakannya tepat waktu dan tepat sasaran. Sebaliknya, daerah yang fiskalnya sempit sering terpaksa menempatkan pendidikan dalam kompetisi keras dengan infrastruktur dasar, kesehatan, dan perlindungan sosial. Konsekuensinya, desentralisasi bisa memperbesar ruang variasi, tetapi juga memperbesar variasi risiko. (Badan Pusat Statistik, 2024)

Di titik inilah perbedaan antara “belanja pendidikan” dan “mutu pembiayaan pendidikan” menjadi sangat penting. Belanja pendidikan yang baik setidaknya harus memenuhi empat syarat. Pertama, cukup besar untuk menjaga akses dan mutu. Kedua, cukup adil untuk mengompensasi ketimpangan kapasitas fiskal. Ketiga, cukup fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan lokal. Keempat, cukup akuntabel agar kebocoran, ketidaktepatan desain, dan belanja simbolik bisa

ditekan. Tanpa empat syarat ini, otonomi daerah berisiko menghasilkan banyak variasi kebijakan, tetapi sedikit kepastian hasil.

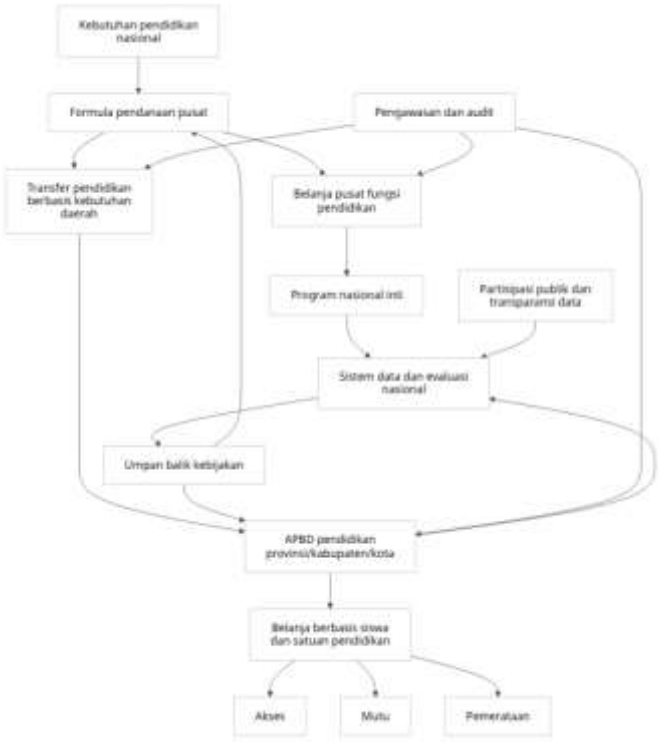
Karena itu, penguatan pembiayaan pendidikan perlu dirumuskan secara lebih operasional.

Tabel 7. Strategi penguatan pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah

Bidang penguatan	Strategi utama	Aktor utama	Indikator yang dapat dipantau
Formula pendanaan	Menggeser sebagian formula ke basis kebutuhan siswa, kemahalan wilayah, dan backlog sarana	Pemerintah pusat, Kemenkeu, kementerian pendidikan	Rasio belanja per siswa, porsi afirmasi untuk daerah rendah kapasitas
Keadilan antardaerah	Memperkuat transfer yang lebih sensitif pada ketimpangan fiskal	Pemerintah pusat dan daerah	Penurunan gap belanja pendidikan per kapita antarwilayah
Kualitas belanja	Menautkan alokasi dengan hasil layanan, bukan hanya serapan	Pemda, dinas pendidikan, Bappeda	Keterkaitan pagu dengan target APS, RLS, kondisi ruang kelas, hasil belajar
Tata kelola data	Membangun dashboard fiskal pendidikan lintas level yang terbuka dan seragam	Kemenkeu, Kemendikdasmen, Kemdiktisaintek, BPS, pemda	Ketersediaan data APBD pendidikan yang comparable
Akuntabilitas program	Memperkuat audit desain program dan evaluasi ex-post	Inspektorat, BPKP, BPK, pengawas internal	Penurunan temuan berulang dan perbaikan ketepatan sasaran
Inovasi daerah	Memberi insentif untuk daerah yang berhasil memperbaiki mutu dengan biaya efisien	Pemerintah pusat dan pemda	Replikasi inovasi dan penghargaan berbasis kinerja
Perlindungan kelompok rentan	Menjaga bantuan personal siswa, biaya tidak langsung, dan akses afirmatif	Pusat, daerah, sekolah	Penurunan putus sekolah dan peningkatan partisipasi kelompok miskin

Tabel strategi di atas menunjukkan bahwa pembiayaan pendidikan yang kuat tidak harus selalu berarti penambahan anggaran besar-besaran. Dalam banyak kasus, perbaikan desain alokasi, perbaikan data, dan perbaikan akuntabilitas justru memberi dampak yang tak kalah besar. Di era otonomi daerah, kualitas koordinasi antarlembaga menjadi kunci. Jika pusat memperbaiki formula tetapi daerah tidak memperbaiki perencanaan, hasilnya tetap terbatas. Jika daerah inovatif tetapi data pusat-daerah tidak sinkron, evaluasi menjadi kabur. Oleh sebab itu, agenda penguatan yang paling realistis adalah agenda yang simultan: reformasi formula, reformasi data, reformasi tata kelola, dan reformasi evaluasi hasil. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025)

Terakhir, untuk menjawab kebutuhan akan model ideal, berikut skema konseptual pembiayaan pendidikan yang lebih cocok bagi era otonomi daerah.



Gambar 7. Skema Konseptual

Model ini menegaskan bahwa pembiayaan pendidikan ideal tidak boleh hanya mengalir satu arah dari pusat ke daerah. Ia harus dibangun sebagai siklus kebijakan yang lengkap: kebutuhan diidentifikasi, formula ditetapkan, pembiayaan didistribusikan, hasil diukur, lalu informasi hasil kembali memengaruhi formula berikutnya. Dalam kerangka semacam ini, otonomi daerah tidak dibiarkan berjalan sendiri-sendiri, tetapi tetap diikat oleh sistem data, evaluasi, dan pengawasan yang memastikan setiap rupiah pendidikan terhubung dengan akses, mutu, dan pemerataan. Dengan pendekatan seperti ini, daerah tetap memiliki ruang inovasi, tetapi ketimpangan kapasitas fiskal tidak dibiarkan menjadi alasan permanen bagi ketimpangan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah adalah medan kebijakan yang menuntut keseimbangan antara amanat nasional dan realitas lokal. Besarnya anggaran nasional memang penting, dan dalam lima tahun terakhir arahnya cenderung meningkat. Namun, yang menentukan dampak nyata justru adalah bagaimana dana itu dipecah ke dalam kanal pembiayaan, bagaimana daerah menerjemahkannya ke APBD, dan bagaimana kualitas belanja dijaga agar tetap fokus pada peserta didik, mutu layanan, dan keadilan antardaerah. Pengalaman DKI Jakarta memperlihatkan bahwa kapasitas fiskal yang kuat memberi fleksibilitas tinggi bagi pembiayaan pendidikan. Sebaliknya, keterbatasan keterbandingan data daerah lain juga menunjukkan bahwa reformasi pembiayaan tidak akan lengkap tanpa reformasi sistem data dan evaluasi.

Pada akhirnya, kunci pembiayaan pendidikan di era otonomi daerah bukan hanya mempertahankan angka 20 persen, tetapi memastikan bahwa setiap lapisan pembiayaan bekerja dalam satu arsitektur yang adil, transparan, dan berorientasi hasil. Jika formula pembiayaan lebih sensitif terhadap kebutuhan, jika transfer lebih kompensatoris, jika APBD lebih berbasis siswa dan satuan pendidikan, dan jika evaluasi lebih menekankan outcome daripada sekadar serapan, maka otonomi daerah dapat menjadi instrumen pemerataan. Namun jika tidak, otonomi justru akan mempertahankan ketimpangan yang sudah ada. Karena itu, agenda reformasi ke depan harus diarahkan pada pembiayaan berbasis kebutuhan, integrasi pusat-daerah, penguatan tata kelola, dan perlindungan yang lebih kuat bagi daerah serta kelompok peserta didik yang paling rentan..

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, N., Al Kautsar, M. D., Hidayat, A., & Koto, F. (2026). Grounding AI-in-Education Development in Teachers' Voices: Findings from a National Survey in Indonesia. *ArXiv Preprint ArXiv:2604.01630*.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Capaian Indikator Utama Pembangunan*.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2020--2022*.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2024*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2025). *Provinsi Riau Dalam Angka 2025*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku APBN 2021*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Buku APBN 2022*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN Kita 2025*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.

Muslim L, K., Ishida, T., Ihsan, A. F., & Rudawan, R. A. (2024). Advancing Global South University Education with Large Language Models. *ArXiv Preprint ArXiv:2410.07139*.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2025). *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Audited*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Presiden Republik Indonesia. (2025). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025*.

Uzdah, N. (2024). Analysis of Governance System and Authority Distribution in DKI Jakarta: A Study of Government Structure and Electoral System. *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *3*(1), 42–50. https://doi.org/10.32734/mah.v3i01.15483

Valette, H. (2024). Analysing the Evolution of Water Governance Models in Indonesia Through the Economies of Worth Framework. *Water Alternatives*, *17*(1).

World Bank. (2020). *The Promise of Education in Indonesia*.

World Bank. (2022). *Indonesia Mass Transit Project*.